



STRATEGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN SELAMA PANDEMI COVID-19 BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KABUPATEN SLEMAN

Decision-making Strategies in Education Services During the Covid-19 for Special Needs Children in Sleman District

Nindy Anna Enggar Weningtyas^{*1}, Kurnia Nur Fitriana¹

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 12-07-23

Diperbaiki 20-07-23

Disetujui 23-07-23

Kata Kunci:

Strategi pengambilan Keputusan, Pelayanan Pendidikan, Anak Berkebutuhan Khusus, Covid-19

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengambilan keputusan yang digunakan pemerintah kabupaten sleman dalam pelayanan pendidikan selama pandemi covid-19 bagi anak berkebutuhan khusus serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendorong. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan. Hal ini ditandai dengan adanya Identifikasi masalah, Pengumpulan Data dan adanya Pembuatan Kebijakan. Namun masih ditemukan beberapa faktor penghambat seperti masih terjadi pengurangan dana minimnya kemampuan guru dalam menggunakan teknologi dan minimnya partisipasi masyarakat. Selain faktor penghambat dalam strategi pengambilan keputusan juga ditemukan beberapa faktor pendorong seperti yaitu adanya regulasi fleksibel adanya kolaborasi para stakeholder dalam pelayanan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus.

ABSTRACT

Keywords:

Decision-making strategies, Education services, Special needs children, Covid-19

This study aims to find out the decision-making strategy used by the Sleman District Government in education services during the covid-19 pandemic for special needs children and to know the inhibitory factors and driving factors. The research design uses qualitative descriptive data retrieval techniques in the form of observations, interviews, and documentation. The results of this study have been conducted in accordance with the procedures formulated. This is characterized by problem identification, Data Collection and Policy Creation. However, there are still several inhibitory factors such as reduction of funds, lack of teachers' ability to use technology and lack of community participation. In addition to inhibiting factors in decision-making strategies, there are also several driving factors such as flexible regulation of stakeholder collaboration in education services for special needs students.

1. Pendahuluan

Pendidikan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Oleh sebab itu negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang layak kepada setiap warganya terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan. Semua orang memiliki hak yang sama untuk menempuh pendidikan dari sejak dini. Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No. 20 Tahun 2003, menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan bermutu. Kasus diskriminasi dunia pendidikan yang sering menjadi kritik untuk pemerintah adalah pendidikan untuk Penyandang Cacat atau yang sekarang dikenal dengan Penyandang Disabilitas. Seperti yang ada di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa, pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental. Dalam mengurangi kasus diskriminasi untuk anak berkebutuhan khusus maka Daerah Istimewa Yogyakarta membuat beberapa kebijakan dalam memberikan pelayanan pendidikan, kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, dalam hal ini pemerintah Yogyakarta juga harus memperhatikan sistem pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Dalam melakukan pelaksanaan peningkatan pelayanan pendidikan bagi ABK di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu bagian dari visi dan misi Gubernur DIY yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY (RPJMD DIY) 2012-2017. Dalam pemenuhan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Sleman sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dilakukan dengan dua sistem pendidikan yaitu sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif. Belum sepenuhnya melakukan penyelenggaraan pendidikan untuk ABK secara efektif di Kabupaten Sleman, kini negara sedang mengalami krisis yang disebabkan oleh virus yang berasal dari Wuhan, China. Pada awal maret tahun 2020 Indonesia telah terpapar virus baru yaitu corona virus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Akibat dari kemunculan virus tersebut menghambat kelancaran aktivitas yang beroperasi di banyak bidang, salah satunya bidang pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 24 Maret, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, surat edaran tersebut menjelaskan bahwa proses belajar mengajar ditetapkan dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh. Pembelajaran secara daring tidak hanya diterapkan pada peserta didik umumnya, namun juga dilakukan pada ABK. Sekolah Luar Biasa (SLB) dan program sekolah inklusi yang mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus dimana peserta didik mempunyai keterbatasan baik fisik, mental intelektual, sosial ataupun emosionalnya yang sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya juga melaksanakan proses pendidikan dalam jaringan. Seperti kebijakan pendidikan yang telah dibuat Mendikbud maka pemerintah Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran Gubernur DIY No. 443/01357 Tentang Antisipasi Penyebaran Infeksi

Covid-19 di Lingkungan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisi tentang meniadakan segala aktivitas siswa di sekolah dan diganti dengan kegiatan belajar di rumah mulai tanggal 23 maret s.d. 31 maret 2020. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur DIY No. 443/01357 tentang Antisipasi Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Pendidikan Di DIY maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membuat Surat Edaran No.421/02280 tentang Pembelajaran Jarak Jauh/di Rumah bagi Anak Sekolah dalam rangka pencegahan Covid-19. Oleh karena itu Sekolah Luar Biasa ataupun Sekolah Inklusi di Kabupaten Sleman mengikuti Surat Edaran yang dikeluarkan oleh DIKPORA pada 23 Maret 2020 tentang segala bentuk kegiatan belajar di sekolah diganti menjadi belajar di rumah.

Pada pembuatan kebijakan dalam memberikan pelayanan pendidikan di Kabupaten Sleman, perlu kontribusi dan peran dari aktor-aktor governance yaitu aktor pemerintah, aktor swasta. Dalam membuat keputusan yang efektif banyak hal yang perlu diperhatikan, hal tersebut dapat mencakup masalah dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan, jenis keputusan, keterlibatan orang-orang (bawahan) dalam mengambil keputusan, bentuk pengambilan keputusan, dan efektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan. Disamping itu pengambilan keputusan dapat dilihat dari dua aspek yaitu proses dan gaya pengambilan keputusan. Mengetahui pentingnya dalam pengambilan keputusan bagi organisasi terutama sekolah. maka Pemerintah Daerah memerlukan strategi yang baik dalam pengambilan keputusan supaya keputusan yang diambil efektif dan memiliki dampak yang baik.

Peran pemerintah Indonesia sangat penting untuk memutus penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Jika pemerintah tidak cepat menanggapi hal tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa negara Indonesia akan menghadapi situasi yang lebih buruk lagi karena cepatnya virus menyebar. Hadirnya pandemi di Indonesia membuat sistem pendidikan di Indonesia pun berubah. pembelajaran yang seharusnya dilakukan secara tatap muka, justru tidak bisa dilakukan untuk mengurangi lajunya penambahan kasus Covid-19. Di tengah ketidakpastian dan situasi kritis ini, maka pemerintah memegang peranan penting untuk merespon, mengelola, sampai membuat keputusan yang sesuai dengan perubahan kondisi yang terjadi di negaranya. Oleh karena itu diperlukan Strategi pengambilan keputusan yang baik dan tepat supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Esensi dari strategi pengambilan keputusan yaitu proses penentuan pilihan. Pengambilan keputusan dapat bersifat rutin dan memiliki struktur tertentu atau dapat juga bersifat sangat kompleks dan tidak terstruktur. Kegiatan pembuatan keputusan meliputi indentifikasi masalah, pencarian alternatif penyelesaian masalah, evaluasi dari alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif keputusan yang baik. Menurut Sondang P. Siagian pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap dasar alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan paling cepat.

Dalam membuat keputusan yang efektif banyak hal yang perlu diperhatikan, hal tersebut dapat mencakup masalah dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan, jenis keputusan, keterlibatan orang-orang (bawahan) dalam mengambil keputusan, bentuk pengambilan keputusan, dan efektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan. Disamping itu pengambilan keputusan dapat dilihat dari dua aspek

yaitu proses dan gaya pengambilan keputusan. Mengetahui pentingnya dalam pengambilan keputusan bagi organisasi terutama sekolah. maka Pemerintah Daerah memerlukan strategi yang baik dalam pengambilan keputusan supaya keputusan yang diambil efektif dan memiliki dampak yang baik. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Strategi Pengambilan Keputusan Dalam Pelayanan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Sleman.

2. Metode Penelitian

Pada kajian strategi pembuatan keputusan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Arikunto, 2014) Penelitian yang menggunakan metode deskriptif juga bertujuan untuk menyelidiki suatu kondisi atau keadaan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan penelitian deskriptif kualitatif menghasilkan data-data yang bukan bersifat angka, melainkan data yang bersumber dari hasil wawancara, observasi langsung di lapangan, dan dokumen-dokumen pribadi atau dokumen-dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman pada Oktober 2022-Februari 2023, Subjek penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive yang terdiri dari Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dikpora DIY, Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Dikpora DIY, Guru SLB Yappenas Kabupaten Sleman, Orangtua Siswa ABK di SLB Yappenas Kabupaten Sleman.

Instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri (human instrument), dengan dibantu oleh instrument oebantu seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Penelitian mengenai Strategi Pengambilan Keputusan Dalam Pelayanan Pendidikan Selama Pandemi Covid-19 Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Sleman menggunakan teknik keabsahan triangulasi sumber dengan menganalisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses mencari dan mengumpulkan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen di lapangan yang berkaitan dengan strategi pembuatan keputusan dalam pelayanan pendidikan selama pandemi covid-19 bagi ABK di Kabupaten Sleman. Data dimulai dengan melakukan pengamatan di lokasi penelitian yaitu mengenai kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Sleman. Kemudian melakukan wawancara dengan informan yang sudah ditentukan terkait dengan startegi pembuatan keputusan dalam pelayanan pendidikan selama covid-19 bagi abk di Kabupaten Sleman. Penelitian juga mengumpulkan data dokumentasi yang dapat mendukung data penelitian yag berkitan dengan strategi pembuatan keputusan dalam pelayanan pendidikan selama covid-19 bagi abk di Kabupaten Sleman.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum catatan-catatan dari lapangan dengan memilih hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Peneliti mereduksi data dari hasil pengumpulan data kemudian disusun secara sistematis supaya memberikan gambaran yang tajam. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2018). Peneliti mereduksi data dengan cara membuat ringkasan secara terstruktur dan memilah data yang telah didapatkan di lapangan yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian yaitu strategi pembuatan keputusan dalam pelayanan pendidikan selama covid-19 bagi abk di Kabupaten Sleman.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyusunan beberapa informasi yang telah diperoleh kedalam suatu bentuk yang rapih. Penyajian data dilakukan guna mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara menyeluruh dan bagian-bagian tertentu dari data. Penyajian data dimulai dengan memberikan deskripsi hasil penelitian, kemudian membandingkan data dengan teori yang digunakan peneliti untuk memperoleh gambaran secara jelas. penjelasan dalam penyajian data secara naratif mengenai strategi pembuatan keputusan dalam pelayanan pendidikan selama covid-19 bagi abk di Kabupaten Sleman.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh (Bugin, 2015). Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi (Moleong, 2017). Penarikan kesimpulan diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dan permasalahan. Dari sisni peneliti akan mencari keterkaitan antara penyajian data dan reduksi data yang berkaitan dengan strategi pembuatan keputusan dalam pelayanan.

3. Hasil dan Pembahasan

Munculnya virus covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan secara langsung ditiadakan untuk sementara waktu, mengingat betapa pentingnya kesehatan masyarakat maka pemerintah menerapkan social distancing untuk beberapa waktu. Dunia Pendidikan juga merasakan dampak dari persebaran virus covid-19 ini dimana kegiatan belajar mengajar dilakukan disekolah ini ditiadakan dan dirubah menjadi belajar dirumah, sistem ini berlaku untuk seluruh siswa termasuk siswa abk. Sekolah Luar Biasa (SLB) dan program sekolah inklusi yang mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus dimana peserta didik mempunyai keterbatasan baik fisik, mental intelektual, sosial ataupun emosionalnya yang sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya juga melaksanakan proses pendidikan dalam jaringan. Seperti kebijakan pendidikan yang telah dibuat Mendikbud maka pemerintah Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran Gubernur DIY No. 443/01357 Tentang Antisipasi Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisi tentang meniadakan segala aktivitas siswa di sekolah dan diganti dengan kegiatan belajar di rumah mulai tanggal 23 maret s.d. 31 maret 2020. Oleh karena itu Sekolah Luar Biasa ataupun Sekolah Inklusi di Kabupaten Sleman mengikuti Surat Edaran yang dikeluarkan oleh DIKPORA pada 23 Maret 2020 tentang segala bentuk kegiatan belajar di sekolah diganti menjadi belajar di rumah.

Dalam melaksanakan pelaksanaan pembelajaran ini peserta didik perlu beradaptasi namun tetap harus meneruskan pembelajaran atau program yang telah dilaksanakan sebelumnya, untuk peserta didik berkebutuhan khusus selain melaksanakan pembelajaran sesuai dengan materi tentunya sudah di modifikasi. Pendidik dan peserta didik dalam kebijakan belajar dari rumah menjadi sumber daya manusia yang utama dalam melaksanakan pelayanan terhadap kebijakan tersebut, dalam pemenuhan kebutuhan guru tingkat SD, SMP dan juga SMA di Yogyakarta sudah mencapai 100% yang diartikan semua kebutuhan guru di Yogyakarta sudah terpenuhi. Selain kuantitas, kualitas dari pendidik maupun peserta didik juga penting dalam implementasi kebijakan belajar dari rumah salah satunya adalah harus menguasai teknologi informasi. Pada kenyataannya, tidak semua guru di Yogyakarta mahir dalam menggunakan teknologi informasi, di Kabupaten Sleman ada sebagian kecil guru yang penguasaan teknologinya masih kurang, selain itu kemampuan guru dalam membuat materi pendukung belajar online di Sleman juga belum merata, hanya sekitar 5% dari total guru di Sleman yang mumpuni di bidang IT, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor usia dan pembelajaran berbasis IT dahulu belum semaju sekarang ini, kendala tersebut diatasi dengan kegiatan kolegial guru. (suarajogja.id, 12 Februari 2022).

Untuk merespon kendala yang dihadapi oleh lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi abk selama pandemi covid-19 dalam hal ini seluruh aktor dalam pemerintah daerah memerlukan strategi pengambilan keputusan yang baik supaya mampu memberikan pelayanan pendidikan selama pandemi covid-19 bagi abk yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun pengambilan keputusan yang baik menurut James S.F Stoner Pengambilan Keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah..

3.1 Identifikasi Masalah

Kemunculan pandemi covid-19 yang membawa dampak pada sektor pendidikan di Kabupaten sleman. Sebagai upaya memutus penyebaran virus covid-19, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pembelajaran secara daring seperti Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, surat edaran tersebut menjelaskan bahwa proses belajar mengajar ditetapkan dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh siswa termasuk siswa abk, sistem ini menyebabkan kesulitan yang dihadapi oleh guru dan siswa. Permasalahan publik yang muncul tersebut direspon dengan cepat oleh pemerintah daerah seperti dikpora diy dan dinas sosial, Pemerintah kabupaten sleman sebagai pemegang pemerintahan daerahnya selalu merangkul para aktor governance. Tentunya dalam pelaksanaannya diperlukan strategi khusus untuk menciptakan pelayanan terbaik kepada stakeholder yang dilayani dengan memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dalam melakukan strategi pengambilan keputusan dalam pelayanan pendidikan dimasa pandemi bagi anak berkebutuhan khusus di kabupaten sleman, pemerintah daerah melakukan analisis yang mendalam untuk merumuskan suatu layanan pendidikan untuk siswa abk analisis ini dilakukan karena adanya perbedaan

kondisi pada siswa abk. Dalam analisis yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten sleman memberikan penyesuaian kurikulum pendidikan dimasa pandemi covid-19 untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK,SLB dimana dalam implementasi layanannya sekolah diberikan wewenang secara penuh sesuai kondisi sekolah supaya dapat membantu siswa abk dalam melakukan kegiatan belajar dirumah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka diperoleh hasil bahwa pelayanan pembelajaran secara daring yang dilakukan siswa abk menemukan permasalahan dalam pengimplementasian layanan pendidikan. Dalam pemecahan permasalahan ini pihak sekolah melibatkan peran orangtua siswa abk untuk berpartisipasi karena peran orangtua sangat penting dalam mendampingi siswa abk dirumah.

3.2 Pengumpulan dan Analisis Data

Perubahan sistem pendidikan dimasa pandemi menjadi tantangan baru bagi guru maupun peserta didik. Adapun metode pembelajaran yang ingin dilakukan harus sesuai dengan kondisi daerahnya. Pengumpulan dan analisis data oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Adapun proses penyelesaiannya dalam pengambilan keputusan yaitu:

3.2.1 Fase Pengumpulan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan beberapa riset untuk mencaritau sekolah-sekolah yang mengalami kendala dalam proses belajar dirumah. Kendala yang dirasakan seperti terkendala jaringan atau bahkan ada siswa abk, hasil riset yang didapatkan pemerintah daerah kabupaten sleman ini akan dijadikan bahan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bukan hanya itu saja hasil riset yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu ditemukan juga mengenai permasalahan pada siswa abk yang tidak memiliki teknologi canggih seperti hp.

Dalam Pengumpulan Fakta yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu dengan bekerjasama dengan PekaPD untuk mendata mengenai sekolah-sekolah yang terhalang atau kesulitan selama kegiatan belajar dirumah oleh siswa abk. Data tersebut akan dikaji secara rinci untuk menentukan berbagai pemecahan masalah dilapangan. maka diperoleh hasil bahwa pengumpulan fakta dalam melakukan strategi pengambilan keputusan dalam pelayanan pendidikan selama pandemi covid-19 bagi abk di kabupaten sleman masih ditemukannya kesulitan-kesulitan yang dirasakan pihak sekolah maupun siswa abk, kendala utama yang ditemukan yaitu ketersediaan hp canggih dan juga orangtua mengalami kesulitan dalam mengontrol emosional siswa abk selama kegiatan belajar dirumah, tetapi kendala tersebut mampu diselesaikan karena adanya kerjasama yang baik antara orangtua siswa abk dengan guru.

3.2.2 Fase Penemuan Ide

Pemerintah daerah membutuhkan data dari sekolah mengenai kemampuan pembelajaran yang diberikan oleh para guru untuk siswa abk. dimana pemerintah menuntut guru harus mempunyai kemampuan pembelajaran secara daring dengan

metode variatif. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mewajibkan pembelajaran secara daring yang dilakukan melalui platform zoom, whatsapp atau google meet. Dalam Penemuan Ide yang dilakukan Pemerintah Daerah yaitu guru dituntut harus mempunyai kemampuan pembelajaran daring, bukan hanya itu saja guru juga melakukan pendataan kepada siswa abk mengenai ketersediaan teknologi dirumah untuk mengetahui ketersediaan fasilitas pada siswa abk selama pembelajaran dilakukan dirumah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka diperoleh hasil bahwa penemuan ide dalam melakukan strategi pengambilan keputusan dalam pelayanan pendidikan selama pandemi covid-19 bagi abk di kabupaten sleman masih ditahap pengumpulan data dan juga analisis seperti yang dilakukan oleh para guru dalam melakukan pendataan kepada siswa abk mengenai ketersediaan teknologi dirumah, data yang sudah terkumpul akan dijadikan bahan rapat dalam merundingkan permasalahan tersebut. Bukan hanya itu saja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga menuntut para guru untuk dapat meningkatkan kemampuan nya dalam pembelajaran secara daring.

3.2.3 Fase Penemuan Solusi

Adanya pemberian bantuan kuota secara gratis oleh pemerintah pusat bukan hanya itu saja pemerintah pusat juga memberikan bantuan dana untuk sekolah, diharapkan dengan bantuan yang diberikan mampu dikelola dengan baik oleh sekolah dan juga dapat membantu proses belajar dirumah dapat berlangsung dengan baik. Tetapi bantuan kuota secara gratis masih belum cukup dalam memberikan layanan pendidikan kepada siswa abk, karena kondisi siswa abk ini sangat istimewa maka DIKPORA memberikan wewenang sepenuhnya kepada sekolah mengenai metode pembelajaran yang akan digunakan selama kegiatan belajar dirumah. Dikpora juga memperbolehkan untuk guru melakukan pendampingan secara langsung kepada abk dengan mengunjungi rumah siswa abk selama 15-20 menit dan kegiatan tersebut dapat dilakukan selama 2 kali dalam seminggu.

3.3 Pembuatan Alternatif-Alternatif Kebijakan

Pembelajaran secara daring yang dilakukan oleh siswa abk mengalami banyak kendala sehingga pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah membuat rencana pembelajaran dilakukan secara langsung tetapi melihat persebaran covid-19 yang terus meningkat maka rencana pembelajaran secara langsung perlu dikaji ulang. Dengan adanya kendala-kendala yang dirasakan oleh guru seperti kemampuan penggunaan teknologi membuat Dikpora DIY melakukan pelatihan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kemampuan para guru. Hal ini dapat dilihat dengan dilakukannya workshop atau bimtek yang ditujukan kepada pihak sekolah dan para guru, bukan hanya itu saja pemerintah daerah juga memberikan layanan home visit untuk memonitoring kondisi siswa abk secara langsung. Layanan home visit yang dilakukan guru ini dilakukan dengan melihat kebutuhan siswa abk selama kegiatan belajar dirumah dan layanan home visit ini menjadi salah satu alternatif lain selama proses pembelajaran dari rumah.

3.4 Strategi Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan Dalam Pelayanan Pendidikan Selama Pandemi Covid-19 Bagi Abk Di Kabupaten Sleman dapat dilihat sebagai berikut mengenai pengambilan keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

3.4.1 Bimtek atau Bimbingan Teknis

Pemerintah Daerah melakukan Bimtek yang diselenggarakan oleh Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (BTKP) untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik akan pemanfaatan serta penggunaan Informasi Teknologi (IT) dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan data terselenggaranya Bimtek pada tahun 2017-2019 menjelaskan bahwa selama 3 tahun terakhir DIKPORA sudah memberikan Bimbingan Teknis sebanyak 1320 tendik dari jenjang pendidikan khusus, pendidikan dasar dan menengah, total tendik SLB dalam bimtek ini terdiri 73 orang. Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi yang menuntut para guru menggunakan teknologi selama pembelajaran jarak jauh maka Pemerintah Daerah melakukan Bimbingan Teknis lagi dimana kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dan tetap mematuhi protocol kesehatan yang berlaku kegiatan ini diikuti sebanyak 120 orang sedangkan kegiatan yang dilaksanakan secara online diikuti oleh 440 orang. Pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam sektor pendidikan terbukti mampu memudahkan proses belajar mengajar, dengan adanya penutupan akses publik (lockdown) akibat pandemic COVID-19 termasuk sekolah maka proses belajar mengajar tatap muka tidak bisa lagi dilaksanakan untuk sementara waktu.

3.4.2 Rapat dengan Stakeholder

Kemunculan pandemi covid-19 yang membawa dampak pada sektor pendidikan di Kabupaten sleman. Sebagai upaya memutus penyebaran virus covid-19, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pembelajaran secara daring seperti Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, surat edaran tersebut menjelaskan bahwa proses belajar mengajar ditetapkan dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh siswa termasuk siswa abk, sistem ini menyebabkan kesulitan yang dihadapi oleh guru dan siswa. Permasalahan publik yang muncul tersebut direspon dengan cepat oleh pemerintah daerah seperti dikpora diy dan dinas sosial, Pemerintah kabupaten sleman sebagai pemegang pemerintahan daerahnya selalu merangkul para aktor governance maupun swasta yang terdiri dari komunitas. Tentunya dalam pelaksanaannya diperlukan strategi khusus untuk menciptakan pelayanan terbaik kepada stakeholder yang dilayani dengan memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Melakukan koordinasi ini nantinya dapat menemukan peluang untuk program kedepannya, hasilnya yaitu aktor governance mengetahui kendala yang dihadapi di sektor pendidikan khususnya pendidikan untuk siswa abk. Dengan analisis yang baik, aktor governance dapat merumuskan program layanan pendidikan untuk siswa abk yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Selama Pandemi Covid-19, sekolah diwajibkan untuk tetap melakukan proses pembelajaran dari rumah. Proses ini berlaku untuk seluruh siswa termasuk siswa abk, adapun pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah

kabupaten sleman untuk siswa abk. Berdasarkan hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan dari kemendikbud tahun 2020. diketahui adanya perubahan sistem pembelajaran pada sektor pendidikan, pada maret 2020 Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, surat edaran tersebut menjelaskan bahwa proses belajar mengajar ditetapkan dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh. Pembelajaran secara daring tidak hanya diterapkan pada peserta didik umumnya, namun juga dilakukan pada ABK. Sekolah Luar Biasa (SLB) dan program sekolah inklusi yang mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus dimana peserta didik mempunyai keterbatasan baik fisik, mental intelektual, sosial ataupun emosionalnya yang sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya juga melaksanakan proses pendidikan dalam jaringan.

Seperti kebijakan pendidikan yang telah dibuat Mendikbud maka pemerintah Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran Gubernur DIY No. 443/01357 tentang Antisipasi Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Pendidikan di DIY maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membuat Surat Edaran No.421/02280 tentang Pembelajaran Jarak Jauh/di Rumah bagi Anak Sekolah dalam rangka pencegahan Covid-19. Oleh karena itu Sekolah Luar Biasa ataupun Sekolah Inklusi yang ada di Kabupaten Sleman mengikuti Surat Edaran yang dikeluarkan oleh DIKPORA pada 23 Maret 2020 tentang segala bentuk kegiatan belajar di sekolah diganti menjadi belajar di rumah adanya kebijakan pembelajaran secara daring sebagai upaya penanggulangan covid-19 oleh pemerintah pusat sangat berdampak pada proses pelayanan pendidikan yang diberikan pemerintah daerah pada siswa abk di kabupaten sleman.

Pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman selama Pembelajaran secara daring untuk siswa abk menggunakan beberapa platform untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran dirumah, sebagai berikut:

a. Melalui Whatsapp

Penggunaan wa ini dimanfaatkan guru untuk memonitoring kebutuhan siswa abk selama pembelajaran dilakukan dirumah, dimana komunikasi yang dilakukan yaitu antara guru dengan orangtua siswa seperti adanya grup wa yang dimanfaatkan guru dalam memberikan materi pembelajaran serta menjadi tempat untuk orangtua melaporkan beberapa kendala yang dihadapi.

b. Melalui Zoom Meeting

Penggunaan zoom ini menjadi salah satu tempat untuk guru dalam menegur sapa siswa abk karna seperti biasa sebelum melakukan kegiatan belajar disekolah para guru akan melakukan kegiatan tegur sapa untuk siswa abk dimana hal ini bertujuan untuk menciptakan mood yang baik pada siswa sebelum memulai kegiatan belajar. Kegiatan tegur sapa ini berubah menjadi online dengan menggunakan zoom meeting, karena perubahan ini maka kegiatan tegur sapa hanya dilakukan seminggu satu kali mengingat banyak siswa yang tidak memiliki hp canggih dan adanya kendala sinyal.

c. Home visit

Dengan adanya kurikulum adaptif yang diberikan oleh pemerintah pusat juga membuat beberapa pelayanan yang diberikan oleh para aktor governance dan

swasta seperti adanya sistem home visit yang dilakukan oleh guru slb. Pelayanan home visit yang dibuat dinas yang bekerjasama dengan guru-guru slb di DIY ini menjadi pelayanan khusus yang diberikan, karena pelayanan ini dilakukan untuk memonitoring secara langsung kegiatan belajar mengajar di rumah dan sistem home visit ini juga sebagai salah satu langkah preventif bagi pemerintah daerah agar siswa abk tidak mengalami kesulitan dalam proses belajar. Layanan home visit ini juga menjadi tempat konsultasi antara orangtua dan guru, guru dapat melihat dan mengetahui perkembangan siswa di rumah. Kesuksesan pelayanan home visit ini juga dibuktikan dengan meningkatnya pemahaman orangtua mengenai pola asuh untuk siswa abk yang diberikan oleh guru selama pendampingan secara langsung di rumah meskipun home visit ini dilakukan dalam waktu 20 menit setiap rumah tetapi hal ini membuat orangtua benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh guru.

3.5 Faktor Penghambat

3.5.1 Pengurangan Anggaran

Faktor penghambat pertama yaitu pengurangan anggaran. Sumber anggaran yang diperoleh kabupaten Sleman berasal dari dana alokasi umum APBN dan pendapatan asli daerah. Kendala yang dihadapi pemerintah saat masa pandemi covid-19 adanya keterbatasan anggaran akibat penurunan pendapatan asli daerah. Kondisi ini menyebabkan terkendalanya beberapa program Kabupaten Sleman di sektor layanan pendidikan untuk siswa abk yang dampaknya tidak dapat menjangkau keseluruhan target siswa abk.

3.5.2 Minimnya Kemampuan Para Guru Menggunakan Teknologi

Faktor penghambat kedua ini kemampuan para guru dalam menggunakan teknologi, dimana saat ini perkembangan teknologi semakin pesat dan pemerintah juga telah menganjurkan kepada seluruh tenaga pendidik dan siswa untuk paham terhadap teknologi. Kondisi yang seperti ini menyebabkan beberapa program layanan pendidikan tidak dapat memenuhi sasaran. Dengan melihat kendala yang dihadapi guru langsung direspon dengan cepat oleh dinas, dinas langsung membuat program khusus pelatihan dalam menggunakan teknologi yang ditujukan untuk para guru bahkan orangtua.

3.5.3 Partisipasi Masyarakat yang Belum Optimal

Faktor penghambat ketiga yaitu pelibatan masyarakat yang belum optimal. Penghambat tersebut tampak pada hasil monitoring yang dilakukan Pekapd terkait respon masyarakat sekitar mengenai siswa abk, masih banyak masyarakat yang melakukan tindak bullying terhadap anak dan juga keluarga abk. Kondisi ini perlu perhatian khusus yang dilakukan oleh aktor *governance*, karena masyarakat mempunyai peran yang penting dalam pemberi layanan pendidikan. Karena dalam pembuatan kebijakan pemerintah tidak boleh meninggalkan salah satu aktor *governance* yaitu masyarakat yang nantinya akan menjadi objek dalam suatu kebijakan. Jadi dibutuhkan masyarakat yang cerdas dalam membantu pemerintah merumuskan suatu kebijakan.

3.6 Faktor Pendorong

3.6.1 Regulasi Fleksibel oleh Pemerintah

Faktor pendorong yang pertama, yaitu adanya regulasi-regulasi fleksibel yang dibuat pemerintah pusat. Dengan adanya regulasi ini seperti kurikulum adaptif membuat kemudahan yang dilakukan dinas dalam menyusun program layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh siswa abk. Kurikulum adaptif ini sangat membantu dalam layanan pendidikan yang dilakukan para guru kepada siswa abk ini sehingga siswa abk tidak kesulitan dalam memahami materi yang diberikan oleh guru.

3.6.2 Kerjasama Para Stakeholder

Faktor pendorong yang ketiga yaitu, banyak para aktor yang menawarkan bantuan kerjasama ke dinas secara sukarela, seperti yang dijelaskan oleh pak suyono dikpora. Hal mengenai pelibatan para aktor governance menjadi hal yang baik untuk menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan para siswa abk.

4. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa strategi pembuatan keputusan dalam pelayanan pendidikan bagi abk selama masa pandemi covid-19 di kabupaten sleman sudah berjalan dengan baik karena dengan strategi pembuatan keputusan yang baik dan tepat maka penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan baik juga. Esensi dari strategi pengambilan keputusan ialah proses penentuan pilihan. Dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan yang agile juga terdapat beberapa faktor pendorong dan juga penghambat dalam proses pelaksanaannya.

Faktor pendorong dalam Strategi Pengambilan Keputusan Dalam Pelayanan Pendidikan Selama Pandemi Covid-19 Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Sleman yaitu adanya regulasi fleksibel yang dibuat pemerintah pusat untuk membantu pemberian pelayanan kepada siswa abk dan adanya kolaborasi para stakeholder untuk memberikan pelayanan kepada siswa.

Faktor penghambat Strategi Pengambilan Keputusan Dalam Pelayanan Pendidikan Selama Pandemi Covid-19 Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Sleman yaitu pengurangan anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah, minimnya kemampuan guru dalam menggunakan teknologi dan minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Referensi

- [1] Afriansyah, H. (2019). Konsep Pengambilan Keputusan. *Konsep Pengambilan Keputusan*, 55-56.
- [2] Ana waty, M.F. & Iftitah, S.L. (2020). Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Di Rumah Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Of Childhood Education*, 4 (1).71-8
- [3] Creswell, J. W. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- [4] Dewi, W.A.F. (2020) Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Disekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 55-61.

- [5] Euis Kurniati, D.K. (2021). Analisis Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Anak*
- [6] Fariha. (2016). Pengambilan Keputusan Strategis Kepala SMK 1 Tolitoli. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 103-114.
- [7] Sanjaya, W. (2013). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: PT. Kenacana Prenadamedia Group.
- [8] Santoso, B. (2017). Kunci Keberhasilan Proses Pengambilan Keputusan. *Jurnal MANAJERIAL*, 8(16), 28-33
- [9] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [10] Winarno, B. (2016) *Kebijakan Publik Era Globalisasi, Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: Buku Seru.